

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Pusdiklatwas BPKP adalah sebagai berikut:

- Kepala Pusat : R. Ersi Soenarsih, Ak.,M.Ec., Ph.D.
- Kepala Bagian Umum : Hari Santosa, Ak.
- Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Diklat : Riri Adda Sari, S.H., M.A.P.
- Koordinator Penyelenggaraan Diklat APIP : Agus Yulianto, Ak.
- Koordinator Penyelenggaraan Diklat SPIP : Ginrey Shandy Algam, S.S.T., M.S.A.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusdiklatwas BPKP Triwulan III Tahun Anggaran 2024 ini, merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Persediaan, Aset Tetap dan *General Ledger* dan Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI Modul Persediaan dan Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

**Basis
Akuntansi**

A.3. BASIS AKUNTANSI

Pusdiklatwas BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusdiklatwas BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pusdiklatwas BPKP per 30 September 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan
-LO**

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

**Aset
Lancar**

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dengan metode penilaian *First In First Out* (FIFO) sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 22 Januari 2022 hal Penerapan Metode *First In First Out* (FIFO).

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Pada Tahun Anggaran 2019, atas hasil penilaian kembali Tahun Anggaran 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal

nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BMN/BMD.
- Pengembalian belanja modal Tahun Anggaran anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

**Penyusutan
Aset Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun Anggaran
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun Anggaran
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun Anggaran
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 Tahun Anggaran

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu Tahun Anggaran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang, termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun Anggaran)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahun Anggaran	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Capaian *Output* Strategis Pada Pusdiklatwas BPKP

Capaian *Output* Strategis selama Triwulan III Tahun Anggaran 2024 yang telah dicapai oleh Pusdiklatwas BPKP, adalah:

Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP							
3676.EBA.994	Layanan Perkantoran	29.586.750.000	24.073.146.836	81,36%	1	1	75,45%
	subjumlah	29.586.750.000	24.073.146.836	81,36%	1	1	75,45%
06. Program Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan							
3674.CAA.051	Pembangunan Prasarana Penunjang Pembelajaran STAR	224.561.114.000	62.697.376.910	27,92%	5	3	60,00%

3674.CAA.122	Rehabilitasi Prasarana Penunjang Pembelajaran PNBP	16.884.239.000	7.071.855.648	41,88%	1	1	85,23%
3674.FAC.110	Diklat Fungsional Auditor RM	2.411.500.000	261.436.499	10,84%	90	97	100%
3674.FAC.120	Diklat Fungsional Auditor PNBP	10.897.260.000	5.802.318.070	53,25%	2.760	1.901	68,88%
3674.FAC.130	Diklat Fungsional Auditor STAR	23.415.990.000	22.167.633.854	94,67%	1.247	1.236	99,12%
3674.FAC.210	Diklat Teknis Substansi RM	5.493.160.000	1.752.838.004	31,91%	230	432	100%
3674.FAC.220	Diklat Teknis Substansi PNBP	15.306.670.000	9.766.625.659	63,81%	9.540	8.356	87,59%
3674.FAC.230	Diklat Teknis Substansi STAR	14.445.688.000	8.048.780.055	55,72%	1105	945	85,52%
3674.FAC.310	Diklat Kedinasan RM	4.002.111.000	2.511.216.932	62,75%	227	181	79,28%
3674.FAC.410	UD/UPKP RM	70.100.000	8.355.900	11,92%	1	1	100%
3674.FAC.510	Diklat Sertifikasi Non JFA RM	1.412.240.000	329.801.038	23,35%	60	73	100%
3674.FAC.520	Diklat Sertifikasi Non JFA PNBP	3.569.245.000	1.885.450.903	52,82%	600	560	93,33%
3674.FAC.530	Diklat Sertifikasi Non JFA STAR	16.379.788.000	11.519.463.951	70,33%	758	774	100%
3674.FAC.540	Pelatihan Instruktur, Asesor dan Trainer STAR	4.019.700.000	2.503.713.511	62,29%	320	336	100%
3674.FAC.610	MOOC RM	133.400.000	59.724.157	44,77%	900	9.427	100%
3674.FAC.620	MOOC PNBP	246.000.000	36.366.371	14,78%	1000	453	45,30%
3674.FAC.710	Seminar RM	862.770.000	172.654.502	20,01%	100	40	40,00%
3674.FAC.720	Seminar PNBP	427.500.000	20.500.000	4,80%	100	-	0,00%
3674.FAC.810	Pengembangan GIA Corpu RM	3.817.476.000	1.550.654.411	40,62%	116	111	95,69%
3674.FAC.820	Pengembangan GIA Corpu PNBP	20.713.978.000	15.493.819.377	74,80%	80	61	76,00%
3674.FAC.830	Pengembangan GIA Corpu STAR	4.973.686.000	2.310.598.282	46,46%	15	11	73,33%
3674.FAC.920	Penilaian Potensi dan Kompetensi PNBP	233.715.000	-	0,00%	206	32	15,54%
	subjumlah	374.277.330.000	155.971.184.034				
	Total	403.864.080.000	180.044.330.870				

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Pusdiklatwas BPKP kode satker 450460 Triwulan III Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp245.426.352.000,00 dan telah dilakukan revisi anggaran, sehingga Pagu Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp403.863.432.000,00. Revisi anggaran tersebut dalam rangka *refocusing* dan realokasi anggaran, berupa pengurangan Belanja Pegawai dari Anggaran Rupiah Murni, penambahan target output dan anggaran atas Belanja Barang dan Belanja Modal dari Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Anggaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Rincian revisi anggaran dan pendapatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Daftar Revisi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Awal	Revisi	Anggaran Revisi
Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	24.422.281	-	24.422.281
Belanja Barang	30.723.551	(7.357.000)	23.366.551
Belanja Modal	-	-	-
Subjumlah RM	55.145.832	(7.357.000)	47.788.832
PNBP			
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	50.160.581	1.233.787	51.394.368
Belanja Modal	14.863.919	2.020.320	16.884.239
Subjumlah PNBP	65.024.500	3.254.107	68.278.607
PHLN			
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	39.600.700	22.010.493	61.611.193
Belanja Modal	85.655.320	140.529.480	226.184.800
Subjumlah PHLN	125.256.020	162.539.973	287.795.993
Total	245.426.352	158.437.080	403.863.432

b. Daftar Revisi Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program (dalam ribuan rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Awal	Revisi	Anggaran Revisi
Rupiah Murni			
Program Dukungan Manajemen	30.443.075	(857.000)	29.586.075
Program Pengawasan Intern	24.702.757	(6.500.000)	18.202.757
Sub jumlah RM	55.145.832	(7.357.000)	47.788.832
PNBP			
Program Dukungan Manajemen	-	-	-
Program Pengawasan Intern	65.024.500	3.254.107	68.278.607
Sub jumlah PNBP	65.024.500	3.254.107	68.278.607
PHLN			
Program Dukungan Manajemen	-	-	-
Program Pengawasan Intern	125.256.020	162.539.973	287.795.993
Sub jumlah PHLN	125.256.020	162.539.973	287.795.993
Total	245.426.352	158.437.080	403.863.432

Target penerimaan PNBP Triwulan III Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp67.035.570.000,00, dan telah dilaksanakan revisi penambahan Target Penerimaan PNBP menjadi sebesar Rp70.390.320.000,00.

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp54.385.908.395

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada adalah sebesar Rp54.385.908.395,00 atau mencapai 77,26 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp70.390.320.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di Pusdiklatwas BPKP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan tanggal 30 September 2024, disajikan pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Triwulan III TA 2024

Uraian Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi PNBP (Rp)	% Realisasi
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	2.266.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	32.462.000	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	7.534.950.000	2.739.500.000	36,36
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	62.337.150.000	51.333.518.194	82,35
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	518.220.000	149.440.000	28,84
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	128.722.201	-
Total	70.390.320.000	54.385.908.395	77,26

Dibandingkan dengan PNBP Triwulan III TA 2023 yang sebesar Rp57.305.235.960,00, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.919.327.565,00 atau 5,09 persen, hal ini disebabkan adanya pendapatan kembali belanja modal Tahun Anggaran anggaran yang lalu karena wanprestasi dari penyedia, selain itu banyaknya hari libur nasional pada awal Tahun 2024, yang mempengaruhi penyediaan kelas diklat. Perbandingan realisasi PNBP Triwulan III TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan III TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.266.000	268.097.999	(265.831.999)	(99,15)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	32.462.000	-	32.462.000	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.739.500.000	4.338.000.000	(1.598.500.000)	(36,85)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	51.333.518.194	48.777.099.100	2.556.419.094	5,24
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	149.440.000	795.420.000	(645.980.000)	(81,21)
Pendapatan Denda	-	302.337.997	(302.337.997)	(100)
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	128.722.201	2.824.280.864	(2.695.558.663)	(95,44)
Jumlah	54.385.908.395	57.305.235.960	(2.919.327.565)	(5,09)

Realisasi Belanja Negara
Rp180.044.330.870

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Pusdiklatwas BPKP Triwulan III Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp180.044.330.870,00 atau 44,58 persen dari anggaran sebesar Rp403.863.432.000,00. Anggaran dan realisasi belanja menurut program pada Triwulan III TA 2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Triwulan III TA 2024

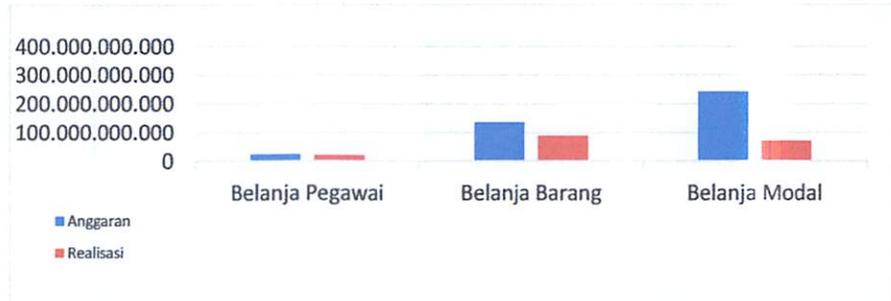
Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	29.586.075.000	23.682.677.935	80,05
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	374.277.357.000	156.361.652.935	41,78
Total	403.863.432.000	180.044.330.870	44,58

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Triwulan III TA 2024

Jenis Belanja		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Kode	Uraian			
51	Belanja Pegawai	24.422.281.000	20.457.771.963	83,77
52	Belanja Barang	136.372.212.000	89.005.483.479	65,27
53	Belanja Modal	243.069.039.000	70.581.075.428	29,04
	Total	403.863.532.000	180.044.330.870	44,58

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Triwulan III TA 2024 disajikan pada Grafik 1.



Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Triwulan III TA 2024

Realisasi belanja Triwulan III TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp28.544.211.771,00 atau 18,84 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2023, disebabkan kenaikan dari belanja pegawai terkait tunjangan kinerja dan Rehabilitasi Prasarana Penunjang Pembelajaran dari Anggaran STAR di Ciawi, Denpasar, Medan dan Makasar.

Perbandingan realisasi belanja Triwulan III TA 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2024 dan 2023

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja Neto Triwulan III		Naik/(Turun)	
		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
51	Belanja Pegawai	20.457.771.963	16.640.181.444	3.817.590.519	22,94
52	Belanja Barang	89.005.483.479	101.276.856.546	(12.271.373.067)	(12,12)
53	Belanja Modal	70.581.075.428	23.553.615.922	47.027.459.506	199,66
Jumlah		180.044.330.870	141.470.653.912	38.573.676.958	27,27

Belanja Pegawai
Rp20.457.771.963

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan III TA 2024 dan TA 2023 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp20.457.771.963,00 dan Rp26.200.475.481,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Triwulan III TA 2024 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Triwulan III TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj.PNS	8.574.861.000	7.221.888.481	84,27
Belanja Gaji dan Tunj. PPPK	723.480.000	475.132.326	65,67
Belanja Lembur	128.232.000	86.516.000	96,85
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	14.995.708.000	12.674.235.156	84,52
Total	24.422.281.000	20.457.771.963	83,77

Realisasi belanja pegawai (*neto*) sebesar Rp20.457.771.963,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp20.469.833.799,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp12.061.733,00.

Dibandingkan dengan realisasi Triwulan III TA 2023, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar

Rp3.817.590.519,00 atau 22,94 persen, antara lain kenaikan tunjangan kinerja dan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja PPPK.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Triwulan III TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Triwulan III TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Neto Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Bel. Gaji dan Tunjangan PNS	7.221.888.481	7.079.887.407	142.001.074	2,01
Bel. Gaji dan Tunjangan PPPK	475.132.326	-	475.132.326	-
Belanja Lembur	86.516.000	71.700.000	14.816.000	20,66
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	12.674.235.156	9.488.594.037	3.185.641.119	33,57
Total	20.457.771.963	16.640.181.444	3.817.590.519	22,94

Belanja Barang
Rp89.005.483.479

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Triwulan III TA 2024 dan TA 2023 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp89.005.483.479,00 dan Rp101.276.856.546,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Triwulan III TA 2024 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Triwulan III TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	9.100.644.000	6.419.986.444	70,54
Belanja Barang Non Operasional	31.989.766.000	16.172.443.510	50,56
Belanja Barang Persediaan	10.942.405.000	9.402.043.899	85,92
Belanja Langganan Jasa	14.375.363.000	8.516.026.517	59,24
Belanja Pemeliharaan	3.099.572.000	2.124.028.723	68,53
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	66.864.462.000	46.370.954.386	69,35
Total	136.372.212.000	89.005.483.479	65,27

Realisasi belanja barang bruto adalah sebesar Rp89.007.432.879,00, sedangkan realisasi pengembalian belanja adalah sebesar Rp1.949.400,00, sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp89.005.483.479,00. Realisasi belanja barang sebesar Rp89.005.483.479,00 termasuk di dalamnya belanja barang bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp45.738.346.783,00 atau 33,54 persen dari total realisasi belanja barang.

Dibandingkan dengan realisasi Triwulan III TA 2023, terdapat penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp12.271.373.067,00 atau 12,12 persen, disebabkan antara lain banyaknya hari libur nasional di awal Tahun 2024, yang mempengaruhi penyediaan kelas diklat.

Perbandingan realisasi Belanja Barang Triwulan III TA 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Triwulan III TA 2024 dan 2023

Uraian Belanja	Realisasi Neto Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	6.419.986.444	5.053.507.157	1.366.479.287	27,04
Belanja Barang Non Operasional	16.172.443.510	27.885.204.694	(11.712.761.184)	(42,00)
Belanja Barang Persediaan	9.402.043.899	8.715.269.748	686.774.151	7,88
Belanja Langganan Jasa	8.516.026.517	8.711.879.121	(195.852.604)	(2,25)
Belanja Pemeliharaan	2.124.028.723	1.387.061.010	736.967.713	53,13
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	46.370.954.386	49.523.934.816	(3.152.980.430)	(6,37)
Total	89.005.483.479	101.276.856.546	(12.271.373.067)	(12,12)

Belanja Modal
Rp70.581.075.428

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan 2023 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp70.581.075.428,00 dan Rp24.022.787.072,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Triwulan III Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Triwulan III Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.138.635.000	7.107.042.182	11,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179.306.718.000	62.662.190.376	34,95
Belanja Modal Lainnya	1.623.686.000	811.842.870	50,00
Total	243.069.039.000	70.581.075.428	29,04

Realisasi belanja modal (neto) sebesar Rp70.581.075.428,00 berasal dari belanja modal (bruto) sebesar Rp70.581.075.428,00 dan tidak ada pengembalian belanja pada belanja modal per 30 September 2024. Realisasi belanja modal sebesar Rp70.581.075.428,00 termasuk di dalamnya bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp63.509.219.780,00 atau 89,98% dari total realisasi belanja modal.

Dibandingkan dengan realisasi Triwulan III Tahun Anggaran 2023, terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp46.558.288.356,00 atau 193,81 persen, disebabkan adanya pengadaan Perangkat Pengolah Data dan pembangunan Prasarana Penunjang Pembelajaran di Kantor Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP di Ciawi, Makassar, Medan, Denpasar. Perbandingan realisasi Belanja Modal Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Belanja Neto Triwulan III (Rp)		Naik /(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.107.042.182	469.171.150	6.168.699.882	657,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.662.190.376	23.084.444.772	39.577.745.604	171,45
Belanja Modal Lainnya	811.842.870	-	811.842.870	-
Total	70.581.075.428	24.022.787.072	46.558.288.356	193,81

Realisasi Belanja Modal Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.581.075.428,00 telah dicatat sebagai perolehan Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap	Jumlah (Rp)
Peralatan dan Mesin (intra)	7.107.042.182
Gedung Bangunan (intra)	1.508.016.750
Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.966.016.496
Total	70.581.075.428

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp8.052.068.025

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.052.068.025,00 dan Rp9.826.719.137,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Rincian Aset Lancar
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	30 September 2024 Rp	31 Des 2023 Rp
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	800.000.000	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	288.444.500	-
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	17.489.600	-
4	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	5.017.278.461	8.033.964.486
5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	49.280.000	524.658.600
6	Persediaan	1.879.575.464	1.268.096.051
	Total	8.052.068.025	9.826.719.137

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp800.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Uraian		Triwulan III Tahun 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	a. Kas Tunai	-
	b. Kas di Bank	172.448.393
	c. Uang Muka Belanja	167.030.000
	b. Kuitansi UP belum di SPJkan	460.521.607
	Sub Jumlah	800.000.000
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	a. Saldo TUP	-
	b. Kuitansi TUP belum di SPJkan	-
	Sub Jumlah	-
Total		800.000.000

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp288.444.500*

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp288.444.500,00. dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp288.444.500,00 adalah penerimaan PNBPN yang belum disetorkan ke Kas Negara per 30 September 2024.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp17.489.600*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp17.489.600,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp17.489.600,00 merupakan kelebihan pembayaran biaya diklat, yang belum dikembalikan.

*Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp5.017.278.461*

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.017.278.461,00 dan Rp8.033.964.486,00. Jumlah sebesar Rp5.017.278.461,00 merupakan temuan pemeriksaan BPK atas akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), yang realisasi pembayarannya melebihi progress pekerjaan untuk Pembangunan *Smart Building* Pusdiklatwas sebesar Rp8.033.964.486,00, dan sudah ditindaklanjuti sampai 30 September 2024 sebesar Rp 3.016.686.025,00.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Rp49.280.000

C.1.5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp49.280.000,00 dan Rp524.658.600,00. Jumlah sebesar Rp49.280.000,00 merupakan pendapatan PNPB atas Biaya Diklat 9 peserta sebesar Rp44.480.000,00 serta pendapatan sewa kantin dan koperasi sebesar Rp4.800.000,00 yang belum diterima sampai dengan 30 September 2024.

Persediaan
Rp1.879.575.464

C.1.6. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.879.575.464,00 dan Rp1.268.096.051,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Persediaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	30 September 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Barang Konsumsi	1.601.317.993	1.002.887.830
2	Bahan untuk Pemeliharaan	209.847.105	187.309.485
3	Persediaan Lainnya	68.410.366	77.898.736
Total		1.879.575.464	1.268.096.051

Nilai persediaan sebesar Rp1.879.575.464,00 merupakan persediaan operasional untuk penyelenggaraan kegiatan diklat dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp316.903.044.439

C.2.Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp316.903.044.439,00 dan Rp250.272.290.049,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Tetap
per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	30 September 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	78.764.310.000	78.764.310.000
2	Peralatan dan Mesin	72.985.523.874	67.425.413.425
3	Gedung dan Bangunan	115.663.781.260	113.934.066.510
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.375.813.000	4.375.813.000
5	Aset Tetap Lainnya	4.225.906.024	4.225.906.024
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	109.557.888.765	45.279.835.610
Nilai Perolehan		385.573.222.923	314.005.344.569
8	Akm. Penyusutan	(68.670.178.484)	(63.733.054.520)
Nilai Buku Aset Tetap		316.903.044.439	250.272.290.049

Tanah
Rp78.764.310.000

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pusdiklatwas BPKP per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp78.764.310.000,00.

Tanah sebesar Rp78.764.310.000,00 tidak termasuk ke dalam Tanah atas transfer masuk Bangunan Rumah Dinas dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Rincian saldo tanah per 30 September 2024 terdiri dari:

No.	Nomor Sertifikat Hak Pakai (SHP)	KIB	Luas (M2)	Nilai
1	6	1	1.284	2.579.364.000
2	25	1	18.602	36.198.562.000
3	26	2	10.623	20.671.827.000
4	28	3	10.353	19.314.557.000
Jumlah				78.764.310.000

Tanah yang digunakan Pusdiklat Pengawasan BPKP seluruhnya sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI cq. BPKP.

Peralatan dan Mesin
Rp72.985.523.874

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp72.985.523.874,00 dan Rp67.425.413.425,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, adalah sebesar Rp22.241.382.574,00.

Mutasi nilai perolehan Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 67.425.413.425
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	Rp 6.924.634.282
- Transfer Masuk	Rp 58.006.860
- Pengembangan Nilai Aset Langsung	Rp 130.035.900
- Perolehan Lainnya	Rp 408.035.821
Jumlah Penambahan	Rp 7.520.712.863
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	Rp 90.714.000
- Koreksi Pencatatan	Rp 1.265.658.414
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp 604.230.000
Jumlah Pengurangan	Rp 1.960.602.414
Nilai Perolehan Per 30 September 2024	Rp 72.985.523.874
Akumulasi Penyusutan s.d.30 September 2024	Rp 50.744.141.300
Nilai Buku Per 30 September 2024	Rp 22.241.382.574

Transaksi nilai Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp7.520.712.863,00, terdiri dari:

a. Pembelian sebesar Rp6.924.634.282,00, dengan rincian:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
Alat Bantu	Buah	2	65.157.000
Alat Bengkel Bermesin	Buah	2	7.800.000
Alat Kantor	Buah	56	536.088.233
Alat Rumah Tangga	Buah	159	740.488.000
Alat Studio	Buah	95	1.212.554.946
Alat Khusus Kepolisian	Buah	1	46.980.000

Komputer Unit	Buah	6	122.500.000
Peralatan Komputer	Buah	156	4.193.066.103
Jumlah			6.924.634.282

- b. Transfer Masuk sebesar Rp58.006.860,00, berupa transfer masuk atas 3 buah Peralatan Mesin berupa *Note Book* dari Pusbin JFA, Perwakilan BPKP Prov. Jawa Barat, dan Kantor BPKP Pusat, dengan rincian:

Uraian	Rp	Unit Penerima	Keterangan
Satu buah <i>Note Book Zen Book Asus Expert Book</i>	18.720.000	Pusbin JFA	BAST Nomor PL.04/BAST-1219/JF/05/2024 tanggal 26 Agustus 2024
Satu buah <i>Note Book Zen Book Asus Expert Book</i>	18.720.000	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	BAST Nomor PL.05/BAST-1849/PW.10/1/2024 tanggal 26 Agustus 2024
Satu buah <i>Notebook HP Zbook Power G10</i>	20.566.860	Kantor BPKP Pusat	BAST Nomor RT.00/BA-684/D203/2024 tanggal 25 Juli 2024
Jumlah	58.006.860		

- c. Pengembangan Nilai Aset Langsung sebesar Rp130.035.900, berupa pengadaan *elevator lift* sebanyak 6 unit.
- d. Perolehan Lainnya sebesar Rp408.035.821,00, merupakan reklasifikasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi akun Peralatan dan Mesin, karena pekerjaan tersebut telah selesai, dengan rincian:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
Peralatan Komputer	Buah	7	408.035.821
Jumlah			408.035.821

Mutasi kurang sebesar Rp1.960.602.414,00, terdiri dari:

- a. Transfer Keluar sebesar Rp90.714.000,00, merupakan Transfer Keluar atas Peralatan Mesin berupa tiga buah *Note Book* di lingkungan BPKP, dengan rincian, yaitu:

Uraian	Rp	Unit Penerima	Keterangan
Satu buah <i>Note Book</i> Dell 5310,Core i7 360'	32.714.000	Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat	BAST No. BA-3759/DL.1/2024 tanggal 27 September 2024
Satu buah <i>Note Book</i> Asus Zenbook 14X OLED	29.000.000	Kantor BPKP Perwakilan Bali	BAST No PL.04/BAST-784/DL.1/2024 tanggal 26 Juli 2024
Satu buah <i>Note Book</i> Asus Zenbook 14X OLED	29.000.000	Kantor BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur	BAST No. PL.04/BAST-785/DL.1/2024 tanggal 26 Juli 2024
Jumlah	90.714.000		

- b. Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.265.658.414, dengan rincian:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
Rak Kayu	Buah	6	57.875.000
CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	170.810.821
Microphone/Wireless MIC	Buah	2	11.600.000
Switch Rak	Buah	1	2.200.000
Wireless Access Point	Buah	15	48.000.000
Switch	Buah	4	34.483.000
Peralatan Jaringan Lainnya	set	18	940.689.593
Jumlah			1.265.658.414

- c. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp604.230.000,00, merupakan penghentian penggunaan aset Peralatan dan Mesin, dikarenakan kondisi rusak berat, sesuai BA Pemeriksaan dan Penilaian BMN yang Diusulkan untuk Dihapuskan Nomor PL.07/BA-2493/DL.1/2024 tanggal 30 April 2024 dan telah disetujui Pihak KPKNL sesuai Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor S-112/MK.6/KM.0803/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPKP, dengan rincian:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	604.230.000
Jumlah			604.230.000

Nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara *ekstrakomptabel* karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi, dengan nilai buku sebesar Rp846.735.506,00.

Gedung dan
Bangunan
Rp115.663.781.260

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing sebesar Rp115.663.781.260,00 dan Rp113.934.066.510,00.

Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, adalah sebesar Rp101.655.281.051,00.

Mutasi nilai perolehan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 113.934.066.510
Mutasi Tambah:	
- Transfer Masuk	Rp 221.698.000
- Pengembangan Nilai Aset	Rp 1.458.405.300
- Pengembangan melalui KDP	Rp 49.611.450
Jumlah Penambahan	Rp 1.729.714.750
Mutasi Kurang:	
Jumlah Pengurangan	Rp -
Nilai Perolehan per 30 September 2024	Rp 115.663.781.260
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	Rp 14.008.500.209
Nilai Buku Per 30 September 2024	Rp 101.655.281.051

Transaksi nilai Gedung dan Bangunan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp1.729.714.750,00, terdiri dari:

- a. Transfer Masuk sebesar Rp 221.698.000,00 berupa penerimaan satu buah Gedung Garasi/Pool Permanen dari Kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk Kantor Pengelola Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan di Medan.
- b. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.458.405.300,00, dengan rincian:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	150.726.000
Gedung Grasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	121.961.000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	3	222.712.500
Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	94.673.500
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	6	868.332.300
Jumlah			1.458.405.300

- c. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp49.611.450,00 berupa Pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Ruang Makan Mess A, dengan rincian:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1	49.611.450
Jumlah			49.611.450

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp4.375.813.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.375.813.000,00. Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, sebesar Rp538.451.025,00.

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas:

Uraian	30 September 2024 (Rp)
Jalan komplek/kantor (Jalan dan Jembatan)	3.069.672.000
Bangunan Penguat Tebing (Irigasi)	280.520.000
Instalasi Gardu Listrik (Jaringan)	1.025.621.000
Total	4.375.813.000

Mutasi nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 4.375.813.000
Mutasi Tambah:	
Jumlah Penambahan	Rp -
Nilai Perolehan per 30 September 2024	Rp 4.375.813.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	Rp 3.837.361.975
Nilai Buku Per 30 September 2024	Rp 538.451.025

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang selama Tahun Anggaran 2023.

**Aset Tetap
Lainnya
Rp4.225.906.024**

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.225.906.024,00 dan Rp4.225.906.024,00, yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa buku-buku perpustakaan dan alat kesenian. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, sebesar Rp4.145.731.024,00.

Mutasi nilai perolehan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 4.225.906.024
Mutasi Tambah:	-
Jumlah Penambahan	Rp -
Nilai Perolehan per 30 September 2024	Rp 4.225.906.024
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	Rp 80.175.000
Nilai Buku Per 30 September 2024	Rp 4.145.731.024

**Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp109.557.888.765**

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp109.557.888.765,00 dan Rp45.279.835.610,00.

Mutasi nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 45.279.835.610
Mutasi Tambah:	
- Saldo awal KDP	Rp 1.191.616.000
- Perolehan /Penambahan KDP	Rp 777.764.400
- Pengembangan KDP Gedung Bangunan	Rp 60.533.214.180
- Koreksi Nilai KDP Bertambah	Rp 108.559.165.678
Jumlah Penambahan	Rp 171.061.760.258
Mutasi Kurang:	
- Pengembangan Melalui KDP	Rp 49.611.450
- Penghapusan/ Penghentian KDP	Rp 106.734.095.653
Jumlah Pengurangan	Rp 106.783.707.103
Nilai Perolehan per 30 September 2024	Rp 109.557.888.765

Mutasi tambah sebesar Rp171.061.760.258,00, terdiri atas:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo awal KDP akibat Kesalahan Pencatatan dalam Aplikasi SAKTI	1.191.616.000
2	Perolehan KDP atas 6 Pekerjaan	777.764.400
3	Pengembangan KDP	106.734.095.653
	Pembangunan Gedung Pusdiklatwas Ciawi, Medan, Makassar, Denpasar dari Anggaran STAR	
3.	Koreksi Nilai KDP Bertambah	108.559.165.678
Jumlah		171.061.760.258

Mutasi kurang sebesar Rp106.783.707.103,00, dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kapitalisasi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Ruang Makan Mess menjadi akun Gedung Bangunan.	49.611.450
2	Kesalahan pencatatan, yaitu dengan menghapus akun KDP, dikarenakan operator pencatatan BMN belum memahami pencatatan BMN di Aplikasi SAKTI	106.734.095.653
Jumlah		106.783.707.103

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp68.670.178.484

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp68.670.178.484,00 dan Rp63.733.054.520,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 disajikan pada Tabel 15, sedangkan rincian lebih lanjut akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan ini.

Tabel 15

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	78.764.310.000	-	78.764.310.000
2	Peralatan dan Mesin	72.985.523.874	50.744.141.300	22.241.382.574
3	Gedung dan Bangunan	115.663.781.260	14.008.500.209	101.655.281.051
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.375.813.000	3.837.361.975	538.451.025
5	Aset Tetap Lainnya	4.225.906.024	80.175.000	4.145.731.024
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	109.557.888.765	-	109.557.888.765
Total		385.573.222.923	68.670.178.484	316.903.044.439

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 30 September 2024, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan		Mutasi	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih
		Saldo per 30 September 2024	Saldo per 31 Des 2023			
1	Peralatan Mesin	50.744.141.300	47.133.678.530	3.610.462.770	4.248.226.662	(637.763.892)
2	Gedung Bangunan	14.008.500.209	12.694.659.277	1.313.840.932	1.275.043.782	38.797.150
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.837.361.975	3.824.541.713	12.820.262	12.820.262	-
4	Aset Tetap Lainnya	80.175.000	80.175.000	-	-	-
Total		68.670.178.484	63.733.054.520	4.937.123.964	5.538.090.706	(598.966.742)

Penjelasan atas selisih akumulasi penyusutan sebesar Rp598.966.742,00 adalah:

No.	Uraian	Rp
1.	Penyusutan Transfer Keluar Peralatan Mesin	(43.124.750)
2.	Penyusutan Transfer Masuk dari Gedung Bangunan	38.797.150
3.	Penyusutan Transfer Masuk dari Peralatan Mesin	9.590.858
4.	Penghentian Aset dari Penggunaan atas 3 buah Kendaraan Roda 4	(604.800.000)
5	Koreksi Pencatatan	570.000
Jumlah		(598.966.742)

Aset Lainnya
Rp3.120.161.014

C.3. Aset Lainnya

Nilai perolehan Aset Lainnya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.120.161.454,00 dan Rp1.810.726.869,00, yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Rincian Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Aset Lainnya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	Per 30 September 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	8.030.905.100	7.120.910.507
2	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	811.842.870	-
3	Aset Lain-lain	1.694.474.498	1.090.244.498
Nilai Perolehan		10.537.222.468	8.211.155.005
Akumulasi Penyusutan		7.417.061.454	6.400.428.136
Nilai Buku		3.120.161.014	1.810.726.869

Aset Tak Berwujud
Rp8.030.905.100

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.030.905.100,00 dan Rp7.120.910.507,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, antara lain berupa *microsoft windows server 32 bit*, *software* komputer. Nilai buku Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan sebesar Rp1.831.500.486,00.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	7.120.910.507
Mutasi Tambah:		
- Perolehan Lainnya	Rp	909.994.593
Jumlah Penambahan	Rp	909.994.593
Mutasi Kurang:		-
Jumlah Pengurangan	Rp	-
Nilai Perolehan per 30 September 2024	Rp	8.030.905.100
Ak. Penyusutan s.d. 30 September 2024	Rp	6.199.404.614
Nilai Buku Per 30 September 2024	Rp	1.831.500.486

Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp909.994.593,00 tersebut berasal dari pembelian *software*, yang merupakan bagian dari pengadaan IT, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Dokumen	No Dokumen	Nilai (Rp)
1	31-05-24	A17249	425.318.918
2	31-05-24	A17248	17.935.135
3	31-05-24	A172411	89.675.676
4	31-05-24	A172412	86.686.486
5	31-05-24	A172410	290.378.378
		Jumlah	909.994.593

*Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp811.842.870*

C.3.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp811.842.870,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Pekerjaan Jasa *Consultant Redesign e-Learning Material JFA* yang belum selesai.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-
Mutasi Tambah:	Rp	811.842.870
Jumlah Penambahan	Rp	811.842.870
Mutasi Kurang:	Rp	-
Jumlah Pengurangan	Rp	-
Nilai Perolehan per 30 September 2024	Rp	811.842.870
Ak. Penyusutan s.d. 30 September 2024	Rp	-
Nilai Buku Per 30 September 2024	Rp	811.842.870

*Aset Lain-lain
Rp1.694.474.498*

C.3.3. Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.694.474.498,00 dan Rp1.090.244.498,00.

Jumlah tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pusdiklatwas BPKP serta dalam proses penghapusan dari BMN, sedangkan nilai buku Aset Lain-lain

pada tanggal pelaporan sebesar Rp476.817.658,00.

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	1.090.244.498
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	604.230.000
Jumlah Penambahan	604.230.000
Mutasi Kurang:	
Jumlah Pengurangan	-
Nilai Perolehan per 30 September 2024	1.694.474.498
Ak. Penyusutan s.d. 30 September 2024	1.217.656.840
Nilai Buku per 30 September 2024	476.817.658

Mutasi Tambah sebesar Rp604.230.000,00, merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya, dengan rincian:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	604.230.000
Jumlah			604.230.000

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya, merupakan penghentian penggunaan aset Peralatan dan Mesin, dikarenakan kondisi rusak berat, sesuai BA Pemeriksaan dan Penilaian BMN yang Diusulkan untuk Dihapuskan Nomor PL.07/BA-2493/DL.1/2024 tanggal 30 April 2024. Proses penghapusan aset saat ini, telah disetujui oleh Pihak KPKNL sesuai Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor S-112/MK.6/KM.0803/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPKPbaru sampai pembentukan Panitia Penilaian Limit Nilai Penjualan.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.417.061.454,00 dan Rp6.400.428.136,00.

Rincian saldo akumulasi penyusutan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri atas:

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp7.417.061.454

No.	Uraian	30 September 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Software	6.199.404.614	5.826.841.535
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	1.177.816.601	573.586.601
	Total	7.417.061.454	6.400.428.136

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintahan karena sudah dalam kondisi rusak berat, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2024 disajikan pada Tabel 17, sedangkan rincian lebih lanjut akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan ini.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per 30 September 2024

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	8.030.905.100	6.199.404.614	1.831.500.486
2	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	811.842.870	-	811.842.870
3	Aset Lain Lain	1.694.474.498	1.217.656.840	476.817.658
	Total	10.537.222.468	7.417.061.454	3.120.161.014

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp3.423.100.153

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.423.100.153,00 dan Rp80.198.920,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	30 September 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	1.524.858.177	80.198.920
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	1.073.895.474	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	24.346.502	-
4	Uang Muka dari KPPN	800.000.000	-
	Total	3.423.100.153	80.198.920

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp1.524.858.177

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.524.858.177,00 dan Rp80.198.920,00. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan pembayaran kepada pihak ketiga, yang pengajuan Surat Perintah Membayar dibuat pada bulan September 2024, namun pembayarannya baru dilakukan pada bulan Oktober 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 September 2024 (Rp)
1	Belanja Barang YMH Dibayar	1.403.424.573
2	Belanja Modal YMH Dibayar	103.944.004
3	Dana Pihak Ketiga	17.489.600
	Total	1.524.858.177

Utang Yang Belum Ditagihkan
Rp1.073.895.474

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.073.895.474,00 dan Rp0,00. Saldo Utang yang Belum ditagihkan sebesar Rp1.073.895.474,00 merupakan tagihan pihak ketiga yang sampai dengan 30 September 2024 belum dibuat Surat Perintah Membayar (SPM).

Pendapatan Diterima Dimuka
Rp24.346.502

C.4.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp24.346.502,00 dan Rp0,00. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka dari penerimaan sewa ATM BRI sebesar Rp32.462.000,00, yang dibayar dimuka, selama 36 bulan dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2027.

Uang Muka dari KPPN
Rp800.000.000

C.4.4. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Muka (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada

pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok Aset Lancar.

Ekuitas
Rp324.652.173.326

C.5. Ekuitas

Ekuitas per tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp324.652.173.325,00 dan Rp261.829.537.135,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Operasional
Rp63.202.874.088

D.1 Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp63.202.874.088,00 dan Rp74.295.284.948,00. Jumlah Defisit Triwulan III Tahun Anggaran 2024, merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp54.043.850.192,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp117.246.724.280,00.

Pendapatan Operasional
Rp54.043.850.192

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp54.043.850.192,00 dan Rp54.799.260.080,00. Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak
Rp54.043.850.192

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp54.043.850.192,00 dan Rp54.799.260.080,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak - LO
Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis PNB	Realisasi PNB Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.915.498	11.691.003	1.224.495	10,47
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.746.250.000	4.364.000.000	(1.617.750.000)	(37,07)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	51.135.244.694	49.236.533.100	1.898.711.594	3,86
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	149.440.000	823.440.000	(674.000.000)	(81,85)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	363.595.977	(363.595.977)	-
Jumlah	54.043.850.192	54.799.260.080	(755.409.888)	(1,38)

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO sebesar Rp755.409.888,00 atau 1,38 persen, disebabkan banyaknya hari libur pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024, yang mempengaruhi penyediaan kelas diklat.

Terdapat selisih antara realisasi Pendapatan Operasional Triwulan III Tahun Anggaran 2024 menurut Laporan Operasional, dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Operasional menurut Laporan Realisasi Anggaran pada periode yang sama, sebesar Rp211.070.002,00, sebagaimana disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Triwulan III TA 2024 Menurut LO dan LRA

Uraian Jenis PNB	Realisasi PNB (Rp)		Naik/(Turun)	
	LO	LRA	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.915.498	32.462.000	(19.546.502)	(60,21)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.746.250.000	2.739.500.000	6.750.000	0,25
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	51.135.244.694	51.333.518.194	(198.273.500)	(0,39)
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	149.440.000	149.440.000	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-	-
Jumlah	54.043.850.192	54.254.920.194	(211.070.002)	(0,39)

Selisih sebesar Rp211.070.002,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan diterima dimuka 2024 untuk masa melebihi Triwulan III TA 2024 atas sewa ATM	24.346.502
2	Pendapatan 2023 yang diterima di 2024	3.747.996
3	Pendapatan yang Masih Belum Diterima sampai dengan Triwulan III TA 2024	49.280.000
4	Pendapatan yang Masih berada di Kas Bendahara Penerimaan	(288.444.500)
	Jumlah	(211.070.002)

*Beban Operasional
Rp117.246.724.280*

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp117.246.724.280,00 dan Rp129.094.545.028,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Beban Operasional Triwulan III TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Belanja Neto Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	20.452.600.783	18.213.438.886	2.239.161.897	12,29
Beban Persediaan	9.020.079.981	8.340.544.229	679.535.752	8,15
Beban Barang dan Jasa	33.091.274.372	43.999.101.556	(10.907.827.184)	(24,79)
Beban Pemeliharaan	2.148.868.903	1.243.963.859	904.905.044	72,74
Beban Perjalanan Dinas	46.585.406.217	52.367.150.400	(5.781.744.183)	(11,04)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.948.494.024	4.930.346.098	1.018.147.926	20,65
Total	117.246.724.280	129.094.545.028	(11.847.820.748)	(9,18)

D.1.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp20.452.600.783*

Jumlah Beban Pegawai pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp20.452.600.783,00 dan Rp18.213.438.886,00. Rincian Beban Pegawai

Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Beban Pegawai
Triwulan III TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	2024	2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.221.591.081	7.629.437.782	(407.846.701)	(5,35)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	475.132.326	-	475.132.326	-
Beban Lembur	86.516.000	79.644.000	6.872.000	8,63
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	12.669.361.376	10.504.357.104	2.165.004.272	20,61
Total	20.452.600.783	18.213.438.886	2.239.161.897	12,29

Realisasi beban pegawai Triwulan III Tahun Anggaran 2024 menurut Laporan Operasional dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai menurut Laporan Realisasi Anggaran pada periode yang sama terdapat selisih sebesar Rp5.171.180,00, sebagaimana disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai
Triwulan III TA 2024 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut (Rp)		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.221.591.081	7.221.888.481	(297.400)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	475.132.326	475.132.326	-
Beban Lembur	86.516.000	86.516.000	-
Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	12.669.361.376	12.674.235.156	(4.873.780)
Total	20.452.600.783	20.457.771.963	(5.171.180)

Selisih sebesar Rp5.171.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran kekurangan pembayaran Gaji bulan Des 2023	(227.100)
2	Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Nov 2023	(4.873.780)
3	Pembayaran kekurangan pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2023	(280.900)
4	Pengembalian kelebihan pembayaran uang makan Bulan Desember 2023	210.600
	Jumlah	1.820.906.718

Beban Persediaan
Rp9.020.079.981

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing Rp9.020.079.981,00 dan Rp8.340.544.229,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Beban Persediaan
Triwulan III TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Belanja Neto Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	8.809.508.307	8.162.844.911	646.663.396	7,92
Beban Persediaan Lainnya	210.571.674	177.699.318	32.872.356	18,50
Total	9.020.079.981	8.340.544.229	679.535.752	8,15

Realisasi Belanja Persediaan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp9.402.043.899,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp9.020.079.981,00. Perbedaan sebesar Rp381.963.918,00, disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Beban Barang dan
Jasa
Rp33.091.274.372

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing Rp33.091.274.372,00 dan Rp43.999.101.556,00.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Beban Barang dan Jasa
Triwulan III TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Belanja Neto Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Rp	%
Beban Barang Operasional	6.999.195.685	5.483.178.743	1.516.016.942	27,65
Beban Barang Non Operasional	17.495.563.310	29.536.858.544	(12.041.295.234)	(40,77)
Beban Langganan Daya dan Jasa	8.544.143.377	8.979.064.269	(434.920.892)	(4,84)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan Mesin	52.372.000	-	52.372.000	-
Total	33.091.274.372	43.999.101.556	(10.907.827.184)	(24,79)

Jika dibandingkan realisasi beban barang dan jasa Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa menurut Laporan Realisasi Anggaran pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp1.982.817.901,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan
Jasa Triwulan III TA 2024 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut (Rp)		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Barang Operasional	6.999.195.685	6.419.986.444	579.209.241
Beban Barang Non Operasional	17.495.563.310	16.172.443.510	1.323.119.800
Beban Langganan Daya dan Jasa	8.544.143.377	8.516.026.517	28.116.860
Beban Ekstrakomptabel	52.372.000	-	52.372.000
Total	33.091.274.372	31.108.456.471	1.982.817.901

Selisih realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.982.817.901,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Beban Listrik Bulan Desember 2023 dibayarkan 2024	(72.817.140)
2	Beban Jasa Profesi (Honor Widyaiswara) Bulan Februari 2023 dibayarkan 2024	(2.000.000)
3	Pembayaran pada pihak ketiga yang belum terbit SP2Dnya, dengan rincian:	
	• Beban Keperluan Perkantoran	568.359.241
	• Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6.300.000
	• Beban Barang Operasional Lainnya	4.550.000
	• Beban Bahan	796.678.000
	• Beban Honor Output Kegiatan	7.160.000
	• Beban Barang Non Operasional Lainnya	519.281.800
	• Beban Sewa	15.984.000
	• Beban Jasa Profesi	86.950.000
	• Beban Aset Ekstrakomptabel	53.372.000
	Jumlah	1.982.817.901

Beban Pemeliharaan
Rp2.148.868.903

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing Rp2.148.868.903,00 dan Rp1.243.963.859,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan
Triwulan III TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Belanja Neto Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.328.517.851	605.489.748	723.028.103	119,41
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	558.724.010	367.975.251	190.748.759	51,84
Beban Persediaan Pemeliharaan	261.627.042	270.498.860	(8.871.818)	(3,28)
Total	2.148.868.903	1.243.963.859	904.905.044	72,74

Jika realisasi beban pemeliharaan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi menurut Laporan Realisasi Anggaran pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp24.840.180,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
Triwulan III TA 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut (Rp)		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.328.517.851	1.569.521.713	(241.003.862)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	558.724.010	554.507.010	4.217.000
Beban Bahan Persediaan Pemeliharaan	261.627.042	-	261.627.042
Total	2.148.868.903	2.124.028.723	24.840.180

Selisih tersebut dikarenakan beban untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp241.003.862,00 belum diajukan Surat Pengajuan Pembayaranannya (SPP), dan beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp4.217.000,00 dan beban bahan persediaan pemeliharaan sebesar Rp261.627.042,00 yang belum terbit SP2D.

Beban Perjalanan Dinas
Rp46.585.406.217

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing Rp46.585.406.217,00 dan Rp52.367.150.400,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada Tabel 28 berikut ini:

Tabel 28
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Triwulan III TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Belanja Neto Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	9.296.135.402	10.597.449.404	(1.301.314.002)	(12,28)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	233.985.000	166.761.049	67.223.951	40,31
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.055.285.815	41.602.939.947	(4.547.654.132)	(10,93)
Total	46.585.406.217	52.367.150.400	(5.781.744.183)	(11,04)

Realisasi Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Beban Perjalanan Dinas dalam Laporan operasional dibandingkan dengan realisasi belanja menurut Laporan Realisasi Anggaran terdapat selisih sebesar Rp214.451.831, sebagaimana disajikan pada Tabel 29 berikut ini:

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Triwulan III TA 2024 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut (Rp)		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Perjalanan Biasa	9.296.135.402	8.874.457.294	421.678.108
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	233.985.000	232.455.000	1.530.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	37.055.285.815	37.264.042.092	(208.756.277)
Total	46.585.406.217	46.370.954.386	214.451.831

Selisih sebesar Rp214.451.831,00, terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	SPBY atau SPP Perjalanan Dinas Biasa yang belum terbit SP2D	421.678.108
2	SPBY atau SPP Perjalanan Dinas Dalam Kota yang belum terbit SP2D	1.530.000
3	SPBY Perjalanan Dinas Peserta Diklat yang belum di SPP kan	(208.756.277)
	Jumlah	214.451.831

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp5.948.494.024*

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing Rp5.948.494.024,00 dan Rp4.930.346.098,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 30 berikut ini:

Tabel 30
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Triwulan III TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Netto Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.248.226.662	3.339.413.708	908.812.954	27,21
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.275.043.782	1.044.383.473	230.660.309	22,09
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	195.495.166	(195.495.166)	(100,00)
Beban Penyusutan Irigasi	-	23.376.666	(23.376.666)	(100,00)
Beban Penyusutan Jaringan	12.820.262	12.820.262	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Beban Amortisasi Software	372.563.079	258.813.855	113.749.224	43,95
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	39.840.239	56.042.968	(16.202.729)	(28,91)
Total	5.948.494.024	4.930.346.098	1.018.147.926	20,65

*Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Rp105.285.077.038*

D.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp105.285.077.038,00 dan sebesar Rp1.154.065.517,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan defisit dari Kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp106.731.829.653,00 dan Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.446.752.615,00. Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin, dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

*Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Rp106.731.829.653*

D.2.1. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Kegiatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan jumlah pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp106.731.829.653,00 dan Rp769.489.922,00.

*Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Rp2.266.000,00*

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp2.266.000,00 dan Rp268.097.999,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional, dengan rincian pada tabel 31 dibawah ini:

Tabel 31
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Pendapatan Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	2.266.000	268.097.999	(265.831.999)	(99,15)
Total	2.266.000	268.097.999	(265.831.999)	(99,15)

**Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp106.734.095.653**

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp106.734.095.653,00 dan Rp1.037.587.921,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan selisih antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas aset yang telah dihapus, dan dikeluarkan dari Neraca pada tanggal pelaporan. Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp106.734.095.653,00 timbul akibat kesalahan pencatatan pada aplikasi SAKTI, dengan rincian pada tabel 32 dibawah ini:

Tabel 32
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi Beban Triwulan III (Rp)		Naik/(Turun)	
	TA 2024	TA 2023	Jumlah (Rp)	%
Beban Pelepasan Aset	106.734.095.653	1.037.587.921	105.696.507.732	-
Total	106.734.095.653	1.037.587.921	105.696.507.732	-

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp1.446.752.615*

D.2.2. SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Kegiatan Non Operasional Lainnya memperoleh surplus pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.446.752.615,00 dan pada Tahun Anggaran 2023 defisit sebesar Rp384.575.595,00.

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.446.752.615,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

*Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp1.446.752.615*

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp1.446.752.615,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Anggaran Yang Lalu	280.900
2	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Anggaran Yang Lalu	128.441.301
3	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.318.030.414
	Jumlah	1.446.752.615

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,00

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp0,00,00 dan Rp384.575.595,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp384.575.595,00 merupakan Beban atas Persediaan Rusak/Usang.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp261.829.537.135

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp261.829.537.135,00 dan Rp202.450.594.990,00.

Defisit LO
Rp168.487.951.126

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp168.487.951.126,00 dan Rp75.449.350.465,00. Jumlah per 30 September 2024 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Koreksi yang Menambah Nilai Ekuitas
Rp105.468.437.239

E.3. Koreksi yang Menambah Nilai Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah Nilai Ekuitas per 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp105.468.437.239,00 dan Rp2.430.604.794,00. Jumlah Koreksi yang Menambah Nilai Ekuitas per 30 September 2024 dan 2023 terdiri atas:

Uraian	30 September 2024 (Rp)	30 September 2023 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	105.468.437.239	2.614.354.794
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	(183.750.000)
Jumlah	105.468.437.239	2.430.604.794

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp105.468.437.239

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp105.468.437.239,00 dan Rp2.430.604.794,00. Jumlah tersebut merupakan koreksi pencatatan nilai/kuantitas dan koreksi barang berlebih hasil inventarisasi.

Transaksi Antar Entitas
Rp125.842.150.077

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp125.842.150.077,00 dan Rp84.237.645.024,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 30 September 2024 dan 2023 terdiri atas:

Uraian	30 September 2024 (Rp)	30 September 2023 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	180.044.330.870	141.470.653.912
Diterima dari Entitas Lain	(54.385.908.395)	(57.305.235.960)
Transfer Masuk	231.316.852	143.428.572
Transfer Keluar	(47.589.250)	(71.201.500)
Jumlah	125.842.150.077	84.237.645.024

Ditagihkan ke
Entitas Lain
Rp180.044.330.870

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp180.044.330.870,00 dan Rp141.470.653.912,00. Jumlah per 30 September 2024 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 30 September 2024.

Diterima dari
Entitas Lain
Rp54.385.908.395

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp54.385.908.395,00 dan Rp57.305.235.960,00. Jumlah per 30 September 2024 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 30 September 2024.

Transfer Masuk
Rp231.316.852

E.4.3. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp231.316.852,00 dan Rp143.428.572,00. Jumlah Transfer Masuk sebesar Rp231.316.852,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
Note Book	Buah	3	58.006.860
Gedung Garasi/Pool Permanen	Buah	1	221.698.000
Sub Jumlah			279.704.860
Penyusutan			(48.388.008)
Jumlah			231.316.852

Transfer Keluar
Rp47.589.250

E.4.4 Transfer Keluar

Jumlah Transfer Keluar per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.589.250,00 dan Rp71.201.500,00. Jumlah Transfer Keluar sebesar Rp47.589.250,00, dengan rincian

sebagai berikut:

Uraian	satuan	kuantitas	Nilai (Rp)
<i>Note Book</i>	Buah	3	90.714.000
Sub Jumlah			90.714.000
Penyusutan			(43.124.750)
Jumlah			47.589.250

Ekuitas Akhir
Rp324.652.173.325

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp324.652.173.325,00 dan Rp213.669.494.343,00. Jumlah ekuitas per 30 September 2024 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp328.075.273.478,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp3.423.100.153,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Data Pinjaman Luar Negeri

Menyikapi tingginya komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas, dan lingkungan strategis yang semakin dinamis, menjadikan kemampuan APIP sebagai faktor penting dalam mengawal akuntabilitas, untuk mempunyai kompetensi yang *sustain*. Peran APIP menjadi semakin penting, bertransformasi menjadi *trusted advisor* yang kemampuannya harus memadai, relevan, dan adaptif terhadap perubahan.

BPKP sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran sentral dalam bidang pengawasan internal, memiliki tugas dalam mendukung target-target pemerintah berkaitan dengan Rencana Strategis 2021-2024, yaitu penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya isu bisnis ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh BPKP, adalah menyelaraskan dan mengoptimalkan SDM yang dimiliki, sehingga mampu mencapai target-target tersebut. Upaya yang paling tepat adalah dengan membentuk *corporate university*, dengan membentuk *corporate university*, diharapkan dapat mengubah strategi pembelajaran yang dilakukan terhadap SDM selama ini, yang bersifat pembelajaran taktis dan fokus pada mengatasi kesenjangan peran pekerjaan spesifik pegawai saat ini, berubah menjadi pembelajaran terintegrasi bahkan strategik yang mampu mengembangkan kapabilitas pegawai dan mengintegrasikan seluruh komponen yang mempengaruhi kinerja pegawai dan organisasi. Hal tersebut dimungkinkan, karena dengan *corporate university* mampu mencakup seluruh SDM yang ada dan memenuhi kebutuhan pengembangan pegawai yang beragam dengan metode pembelajaran secara virtual dan konten pembelajaran yang lebih spesifik sesuai tuntutan pekerjaan. Saat ini BPKP telah menerbitkan Keputusan Kepala Nomor KEP-205/K/DL/2019 tentang Pengembangan Sistem Pembelajaran Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

GIA Corporate University (Corpu) adalah inisiatif yang dilahirkan sebagai upaya adaptif untuk menjawab permasalahan tersebut. Pusdiklatwas BPKP, telah menggunakan *GIA Corporate University (Corpu)* dalam proses pembelajaran, dengan diharapkan *GIA Corpu* mampu menyiapkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia, mampu mendukung kinerja organisasi dan membantu pencapaian sasaran organisasi, menjadi wadah pengembangan kompetensi bersama bagi seluruh komunitas APIP dan stakeholders terkait, mampu menjadi mitra strategis bagi pengguna dan stakeholders untuk membangun tata kelola yang baik, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang akuntabel.

Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan negara, Pusdiklatwas BPKP telah melaksanakan Proyek Pinjaman Luar Negeri *State Accountability Revitalization (STAR)* dari ADB sejak Tahun Anggaran 2013. Proyek STAR berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengelolaan Keuangan Negara (PKN), pengembangan sistem dan modul *e-learning*, dan penguatan institusional. Proyek STAR yang telah berakhir pada 31 Maret 2021, secara keseluruhan dinilai berhasil dengan capaian lebih dari 100% untuk seluruh output kegiatannya.

BPKP melanjutkan proyek STAR melalui skema baru yaitu *State Accountability Revitalization Additional Financing (STAR AF)* Loan ADB No.3872-INO, yang disepakati bersama oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB melalui penandatanganan *Loan Agreement* nomor Register 17JE53EA pada tanggal 9 Desember 2019. STAR AF dinyatakan efektif berlaku mulai tanggal 15 Januari 2021, dengan Surat ADB Nomor 002/L0STAR/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal STAR *Additional Financing Declaration of Effectiveness*.

Keberlanjutan proyek ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dan dukungan ADB dalam meningkatkan pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara. Sumber Daya Manusia berkualitas di bidang pengelolaan keuangan negara dan internal audit yang telah terbangun akan didukung oleh STAR AF dengan pengembangan infrastruktur IT, dalam mempercepat pelaksanaan proses bisnis pengelolaan keuangan dan internal audit.

Selain itu, STAR AF juga bermanfaat untuk mengantisipasi tuntutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dalam hal tata kelola, proses bisnis, monev, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian, fungsi pengelolaan keuangan negara dan audit internal dapat lebih terjamin dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah (*Public Finance Management - PFM*) yang baik dan bersih.

F.2. Profil Pinjaman STAR AF ADB Loan No. 3872-INO

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan, Pembebanan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Melalui Rekening Khusus Spesifikasi Pelaksanaan Pencairan/Pembebanan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman Luar Negeri 3872-INO *State Accountability Revitalization* tertuang pada Tabel 33 di bawah ini:

Tabel 33. Profil Pinjaman STAR AF ADB
Loan No. 3872-INO

No	Uraian	Profil Pinjaman
1	Nama PHLN	<i>Loan Agreement Between The Republic of Indonesia and ADB</i>
2	Pemberi Pinjaman	<i>Asian Development Bank (ADB)</i>
3	Nama Proyek	<i>State Accountability Revitalization Additional Financing (STAR AF)</i>
4	<i>Loan ID</i>	ADB Loan No.3872-INO
5	No. Register	17JE53EA
6	<i>Date Sign</i>	19 Desember 2019
7	<i>Data Effective</i>	15 Januari 2021
8	<i>Closing Date</i>	30 Desember 2025
9	<i>Loan Amount</i>	USD 90.000.000,00
10	Jumlah Uang Muka Pinjaman	USD 1,500,000.00
11	No. Rekening Khusus Pinjaman	601.346.411.980
14	<i>Executing Agency</i>	BPKP
15	Pemeriksa	BPK